

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



JUDUL:

**REKONSTRUKSI SOSIAL-HISTORIS KAWASAN *FRONTIER* AGRO-INDUSTRI
DI LAMPUNG**

TIM PENGUSUL:

Drs. Ikram, M.Si.	NIDN 0002066212	SINTA ID 6037854
Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A.	NIDN 0016018703	SINTA ID 6682749

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Rekonstruksi Sosial-Historis Kawasan Frontier Agro-Industri Lampung

Manfaat sosial ekonomi : Menyediakan pertimbangan historis bagi kebijakan pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Drs. Ikram, M.Si.

b. NIDN : 0002066212

c. SINTA ID : 6037854

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Jurusan : Sosiologi

f. Nomor HP : 081379629554

g. Alamat surel (e-mail) : ikram.badila@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A.

b. SINTA ID : 6682749

c. Jurusan : Sosiologi

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 orang

Jumlah staf yang terlibat : 1 orang

Lokasi kegiatan : Kab. Tulang Bawang, Lampung

Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan

Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

Sumber dana : BLU Universitas Lampung 2021

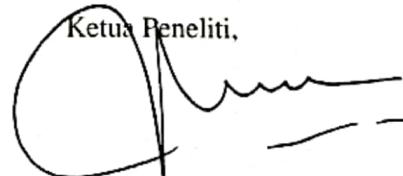
Bandar Lampung, 20 September 2021

Mengesahkan
Dekan FISIP
UNIVERSITAS LAMPUNG



Dra. Nurhidayah, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Ketua Peneliti,



Drs. Ikram, M.Si.
NIP. 196106021989021001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,



Dra. Kusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Kegiatan.....	5
1.4 Temuan yang Diharapkan	6
1.5 Kontribusi Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Menjadikan Komoditas Sebagai Lensa: <i>Commodity frontiers</i>	7
2.2 Pembangunan, Transmigrasi, dan Agribisnis	9
2.3 <i>Road Map</i> Penelitian.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Kerangka Penelitian	13
3.2 Teknik Penggalan Data.....	13
3.3 Alur Penelitian	14
3.4 Indikator Capaian.....	14
BAB IV TRANSFORMASI AGRARIA DI TULANG BAWANG	16
4.1 Kebijakan Pembangunan dan Transformasi Agraria	16
4.2 Komoditisasi dan Perampasan Lahan	18
BAB V DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI TINGKAT LOKAL	20
5.1 Perlawanan terhadap Pembangunan	20
5.2 Reaksi Politik Petani Transmigran	22
BAB V KESIMPULAN	25
REFERENSI	27

RINGKASAN

Penelitian ini hendak memeriksa sejarah Lampung berkenaan dengan perkembangan wilayahnya sebagai salah satu pusat industri pertanian di Indonesia. Analisis sosial-historis tentang perkembangan Lampung sudah dilakukan namun tidak banyak yang menyorotinya melalui lensa *commodity frontier*. Kajian ini akan dilakukan pada kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu pusat industri pertanian di Lampung melalui analisis atas kebijakan pembangunan, transmigrasi, dan komodifikasi pertanian. Hal ini diperlukan untuk menyediakan gambaran konteks yang holistik berkenaan dinamika wilayah ini yang masih kerap diwarnai oleh konflik agraria. Secara khusus, kami ingin memeriksa hubungan antara kebijakan pembangunan di masa Orde Baru, transmigrasi, dan ekspansi industri pertanian di Tulang Bawang untuk mengungkap proses komodifikasi yang berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analitis ekonomi politik agraria. Data yang dikumpulkan merupakan perpaduan dari studi arsip dan penelitian etnografis. Metode ini diharapkan mampu mengkombinasikan perspektif dari ‘atas’ (pemerintah, analis pembangunan) dan ‘bawah’ (sejarah lisan di level komunitas) sehingga dapat menghasilkan rekonstruksi historis yang kuat dan kritis. Kami berargumen bahwa telaah sosial-historis penting untuk dipertimbangkan guna memberi penjelasan mengapa konflik agraria kerap kali muncul di salah satu wilayah industri pertanian utama di Lampung ini serta menyediakan preferensi untuk mengantisipasi hal tersebut di masa depan sekaligus menjadi kontribusi untuk rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kata kunci: *commodity frontier*, komodifikasi, industri pertanian, Lampung

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari perspektif pembangunan, provinsi Lampung tengah berkembang menjadi salah satu kawasan agroindustri utama di Indonesia. Beberapa industri pertanian yang telah berkembang dan mapan dapat dijumpai, misalnya agroindustri nanas (PT Great Giant Pineapple), agroindustri pisang (NTP), dan perkebunan tebu Sugar Group Companies yang telah menghasilkan komoditas pangan untuk pasar nasional maupun internasional. Selain agroindustri yang lahan dan operasional sepenuhnya dikelola oleh perusahaan, industri pertanian yang bertopang pada kinerja petani kecil (*smallholders*) namun dengan kontribusi suplai bahan baku yang signifikan bagi industri juga eksis, misalnya dalam kasus agroindustri singkong di mana produksi singkong Lampung merupakan yang utama secara nasional. Beberapa pengamatan di permukaan ini memperlihatkan lansekap Lampung sebagai kawasan agroindustri yang kontribusinya signifikan baik bagi pasar nasional maupun global.

Dari perspektif historis, pembangunan wilayah agroindustri Lampung juga menarik karena lintasannya (*trajectory*) mempertautkan beberapa tema penting yakni demografi, pembangunan, pertanian, dan industri. Aspek temporal dan spasial (ekologi) signifikan untuk diperhatikan semenjak lintasan pembangunan tersebut dengan eksekusi agroindustri hari ini berlangsung dalam tempo satu abad saja. Perubahan lingkungan di Lampung dalam satu abad terakhir sangat dramatis terutama disebabkan oleh pemindahan populasi melalui program transmigrasi. Sehingga secara ekologis, dapat dinilai bahwa layanan ekologis yang disediakan hutan primer telah digantikan oleh lansekap ekologis baru yang didominasi pertanian, baik dalam model pertanian padi dan hortikultura maupun model perkebunan (karet, kelapa sawit). Secara demografis, kebijakan transmigrasi yang telah berkontribusi pada perubahan lansekap di atas pada gilirannya menyediakan tenaga-kerja bagi model pertanian industrial yang berkembang kemudian. Dengan demikian kita bisa melihat adanya seutas tali yang menghubungkan rumah tangga petani kecil (*smallholders*) dengan industri pertanian.

Meski demikian, tidak banyak dijumpai kajian sosial-historis tentang pembangunan yang terjadi di Lampung khususnya melalui lensa komoditas. Padahal peranan komoditas dalam membentuk lansekap ekonomi-politik dan sosial-budaya di Lampung sangat eksplisit. Apalagi semenjak kebijakan liberalisasi ekonomi jilid 1 diluncurkan pemerintah Orde Baru pada parawal 1980an, mulai terjadi transisi dari dominasi pertanian skala-kecil menuju model agribisnis industrial yang mengkonsolidasikan rezim pangan korporat (McMichael, 2020), sebagaimana

dicontohkan oleh perusahaan-perusahaan komoditas pangan ternama di muka. Bisa dikatakan bahwa salah satu fase krusial sejarah sosial di Lampung yakni berkaitan dengan konstruksi ruang produksi komoditas (pangan) yang didominasi rezim pangan korporasi. Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa sejarah pembangunan agroindustri di Lampung melalui konsep komoditas rintisan (*commodity frontiers*). Penelitian akan dilakukan di salah satu wilayah agroindustry utama di Lampung yakni kabupaten Tulang Bawang. Di wilayah kabupaten ini setidaknya terdapat empat kawasan agroindustri yakni kelapa sawit, industri gula, tepung tapioka, dan tambak udang. Empat kawasan industri ini memuat dua model untuk mengindikasikan relasi produksi yang bekerja yakni model integrasi petani kecil dengan industri (kelapa sawit, singkong, udang) dan model konsesi dan pengelolaan oleh perusahaan (industri gula). Dengan memeriksa sejarah dari munculnya relasi produksi dalam konteks produksi komoditas pangan tersebut, penelitian diharapkan mampu mengurai cara-cara bagaimana petani kecil dan industri terhubung. Pemahaman ini penting untuk dilakukan salah satu guna memahami lebih dalam akar dari konflik-konflik agraria yang cukup intensif terjadi di kabupaten ini, pada konteks produksi komoditas yang berbeda-beda.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana kawasan agroindustri dapat berkembang di Tulang Bawang?
- Bagaimana memahami hubungan antara komunitas petani (transmigran) dengan industri pertanian yang berkembang di sana?
- Sejauh mana keduanya dapat memunculkan relasi mutual dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan?

1.3 Tujuan Kegiatan

1.3.1 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komodifikasi, serta lintasan produksi komoditas dan kawasan agroindustri Tulang Bawang. Pemahaman ini berguna untuk menilai model pembangunan yang dilakukan di satu wilayah. Dengan begitu, dalam konteks pembangunan penelitian ini bisa menunjukkan bagaimana komunitas petani (sebagai salah satu sumber tenaga kerja) terhubung dengan aktivitas agroindustri. Sorotan terhadap masalah ini

dapat memberikan indikasi sejauh mana relasi produksi yang bekerja berkontribusi terhadap distribusi kemakmuran dari segenap aktivitas produksi yang dilakukan pada satu wilayah.

1.3.2 Urgensi Penelitian

Penelitian untuk merekonstruksi sejarah perkembangan kawasan ini tentunya diperlukan agar dapat berkontribusi bagi perencanaan pembangunan daerah ke depannya, selain untuk lebih memahami akar dari konflik agraria yang mengemuka di wilayah ini sehingga dapat menyediakan landasan rekomendasi yang lebih tepat untuk membuka model pembangunan berkelanjutan sekaligus menyelesaikan konflik agraria.

1.4 Temuan yang Diharapkan

Temuan yang diharapkan dalam penelitian ini:

- Lintasan (*trajectories*) pembangunan agroindustri di Tulang Bawang
- Model relasi produksi antara industri dan petani
- Dimensi perubahan lansekap dalam lintasan pembangunan agroindustri

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini akan berkontribusi pada:

- Akademik: memberi perspektif baru tentang sejarah pembangunan di Lampung dari perspektif komoditas
- Publik: menginformasikan hubungan kausal dan akar historis tentang industri dan konflik agrarian sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan resolusi konflik maupun tawaran model pembangunan alternatif.
- Pemerintah: memberikan tawaran pertimbangan bagi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan memerhatikan aspek pembangunan sumber daya manusia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Menjadikan komoditas sebagai lensa: *commodity frontiers*

Konsep komoditas rintisan (*commodity frontier*) yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pengertian yang dipaparkan oleh Jason Moore (2000). Dalam artikelnya yang berjudul *Sugar and the Expansion of the Early Modern World Economy*, Moore memaparkan empat kriteria di dalam analisis komoditas rintisan. Pertama-tama, komoditas rintisan merupakan turunan dari konsep rantai komoditas dalam analisis sistem-dunia yang merujuk pada “jaringan tenaga kerja dan proses produksi yang berakhir di dalam hasil akhir produk komoditas” (Hopkins dan Wallerstein, 1986 dalam Moore, 2000: 410). Meski demikian dalam analisis komoditas rintisan, titik berangkatnya bukanlah produk akhir (komoditas) melainkan produk (bahan) mentah. Konsep komoditas rintisan menempatkan ekonomi-dunia sebagai unit analisis primer, ketimbang negara-bangsa, sebagaimana dilakukan dalam kajian ekspansi wilayah rintisan tradisional (Moore, 2000).

Kedua, konsep komoditas rintisan berguna dalam menelusuri ekspansi kapitalisme serta menyediakan jalan untuk menghubungkan produksi komoditas secara spesifik dan relasi kerja pada lokasi tertentu. Konsep ini menyoroti cara bagaimana produksi komoditas di suatu lokasi spesifik tertentu dibentuk dan turut membentuk ekspansi sosio-spasial hukum nilai yang mengkondisikan orang-orang menjadi terpaksa untuk “menjual untuk bertahan”. Pendekatan ini membuka peluang untuk dilakukannya pemeriksaan mendalam tentang bagaimana ekonomi-dunia dan ekosistem lokal berinteraksi untuk menentukan tingkat dari ekspansi kapitalisme (Moore, 2000, p. 411).

Ketiga, konsep ini juga menyediakan perangkat teoresasi yang spesifik tentang perluasan dan pendalaman sistem pembagian kerja secara sosial secara simultan. Komoditas rintisan dapat memberikan makna tentang “efek berganda” (*multiplier effect*) dalam pengertian ekspansi spasial dan jangkauan global dari hukum nilai. Keempat, dengan mempertimbangkan bahwa komoditas rintisan didasarkan pada eksploitasi lingkungan, konsep ini menyediakan ruang untuk mengeksplorasi kesalingterhubungan antara produksi di satu tempat, dengan ekspansi kapitalis secara umum (Moore, 2000, p. 411).

Moore memperingatkan pentingnya untuk peka terhadap dua pengertian ruang dalam analisis komoditas rintisan. Konsep ini memiliki dua dimensi yang secara simultan merujuk pada pergerakan sosio-spasial tertentu dan tempat tertentu dengan demikian rintisan (*frontier*)

merujuk baik pada “ruang-dari-alur” sebagaimana halnya “ruang-dari tempat”. Ia mendefinisikan secara lebih jelas sebagai berikut:

“A frontier is a zone beyond which further expansion is possible in a way that is limited primarily by physical geography and the contradictions of capitalism rather than the opposition of powerful world-empires. The frontier is a specific kind of space defined by the forward movement of the (capitalist) system. Further expansion is possible so long as there remains uncommodified land, and to a lesser extent labor, “beyond” the frontier” (Moore, 2000, p. 412)

Definisi tersebut menyiratkan bahwa meskipun rintisan diasosiasikan dengan suatu wilayah atau zona tetapi karena zona ini didefinisikan oleh pergerakan sistem kapitalis yang akumulatif dan ekspansif. Ekspansi ini dimungkinkan sejauh ada lahan yang belum dikomodifikasi dan tenaga kerja, di luar zona rintisan semula. Dengan demikian, konsep ini akan membedah transformasi tanah dan tenaga kerja dalam lingkup proses industrialisasi. Di sinilah konsep ini menemui relevansinya untuk digunakan sebagai perangkat analisis dalam merekonstruksi perkembangan Tulang Bawang sebagai salah satu pusat industri pertanian di Lampung.

Pengertian di atas akan sangat membantu kita dalam memahami lintasan (*trajectory*) pembangunan di Lampung yang dalam kurun waktu sekitar 1 abad telah mengalami perubahan lansekap (ekologi) yang sangat signifikan, dimulai dari penetapan wilayahnya sebagai lokasi program transmigrasi (Levang, 2003). Jika kita melihat perubahan lansekap pada peta wilayah pesisir timur Lampung yang saat ini mencakup Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Mesuji, sebagaimana datanya dengan sangat rinci dipresentasikan dalam laporan Patrice Levang (1989), kawasan ini bahwa mengalami peningkatan populasi dan perubahan tata-ruang yang pesat dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun saja.

Secara spesifik, pemeriksaan atas perubahan ekologi yang didorong oleh ekspansi kapitalisme melalui penanaman komoditas-komoditas pasar dunia di Tulang Bawang akan juga membawa analisis pada transformasi sistem ekonomi mengingat kedudukan Tulang Bawang yang cukup penting sebagai sumber produksi lada pada masa ekonomi kolonial. Meski demikian, analisis komoditas rintisan yang akan diperiksa dalam penelitian ini akan dibatasi pada masa Orde Baru saja, yakni sejak periode 1970an ketika program transmigrasi negara dilakukan di wilayah ini yang kemudian diikuti oleh pemberian konsesi perkebunan kepada perusahaan-perusahaan agribisnis di periode 1980an seiring dengan perubahan kebijakan ekonomi nasional—kebijakan liberalisasi jilid 1 (Habibi, 2014).

2.2 Pembangunan, transmigrasi, dan agribisnis

Sebagai sebuah instrumen kebijakan distribusi populasi, program transmigrasi di masa Orde Baru merepresentasikan kekuatan pemerintah pusat terhadap daerah semenjak perencanaan dan implementasi program seluruhnya ditentukan oleh pemerintah pusat (Tirtosudarmo, 2001). Banyak kajian telah memerhatikan hubungan antara transmigrasi dengan sumber daya alam, baik yang menyoroti dampak negatif program tersebut berkenaan dengan perubahan ekologi yang drastis maupun menyoroti perebutan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh transmigrasi. Kajian Elmhirst di Lampung Utara memeriksa politik ruang berkenaan dengan kontrol atas sumber daya yang dilakukan oleh transmigran maupun penduduk lokal Lampung yang beririsan dengan politik identitas (Elmhirst, 1999).

Pada tulisan yang lain, ia juga memerhatikan perubahan dalam mekanisme kontrol atas sumber daya alam dari dua kelompok sosial berbeda tersebut pada konteks transmigrasi lokal (*translok*) dan pembangunan agro-industri skala luas. Elmhirst menyoroti adanya ambivalensi terkait kelas di dalam pembangunan dan struktur otoritas diantara kedua komunitas tersebut. Ia menunjukkan bahwa elit lokal dalam meningkatkan kemakmurannya dengan mengkapitalisasi ketidakpastian ekonomi dan politik serta menggunakan wacana perlawanan masyarakat adat untuk mempertahankan “hak tradisional” mereka atas lahan. Transmigran tidak bisa dipandang sebagai “wakil” dari “pusat” (Jawa) yang didatangkan untuk meningkatkan kemakmuran daerah sebab mereka pada gilirannya terjebak pada kesulitan kontrol atas sumber daya di tengah lansekap yang baru. Kajian Elmhirst memperlihatkan bahwa politik resistensi perlu melampaui kategori etnis sehingga memungkinkan adanya aliansi diantara kelompok-kelompok sosial yang dieksklusikan aksesnya atas sumber daya (Elmhirst, 2001).

Meskipun menempatkan analisisnya pada konteks pembangunan agro-industri skala besar, problematisasi perebutan sumber daya diarahkan Elmhirst pada relasi antara kelompok sosial lintas budaya yang dipertemukan melalui transmigrasi. Di sisi lain, penting untuk memerhatikan relasi yang bersifat vertikal berkenaan hubungan antara komunitas dengan negara dan juga modal semenjak keduanya memainkan peranan krusial dalam geo-politik demografi di Indonesia (Levang, 2003). Pengamatan demikian banyak dilakukan pada kasus transmigrasi pada periode akhir masa Orde Baru seiring dengan bonanza komoditas minyak kelapa sawit.

Tania Li mengamati bahwa regulasi transmigrasi yang diluncurkan di akhir pemerintahan Orde Baru pada 1997 secara eksplisit berupaya untuk mengkoneksikan kebijakan transmigrasi dengan kepentingan investasi agribisnis. Regulasi transmigrasi mengasumsikan

bahwa investor agribisnis yang beroperasi pada skala global mencari keuntungan kompetitif. Hal ini ditindaklanjuti oleh departemen transmigrasi untuk mencari daerah yang atraktif bagi investor, dengan menyediakan tenaga kerja dan menciptakan kota-kota baru yang memenuhi standar internasional. Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menarik minat investor ini dengan menyediakan lahan-lahan yang “tidak produktif” sebagai lokasi bagi sasaran transmigrasi maupun pembangunan agro-industri. Dengan demikian, para transmigran ditempatkan sebagai mitra dari perusahaan agribisnis (Li, 2011: 8).

Li berpendapat bahwa skema ini merupakan kelanjutan dari skema transmigrasi lama yang menempatkan tenaga-kerja (transmigran) sebagai cadangan tenaga kerja. Banyak dari petani yang menemui kegagalan dalam transmigrasi pada akhirnya mesti mencari jalan penghidupan sebagai buruh murah bagi industri perkebunan yang ada di daerahnya. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya konflik antara pendatang dan penduduk lokal yang seringkali konfliknya diekspresikan sebagai konflik etnis alih-alih dalam pengertian kelas. Penting untuk memerhatikan lintasan pembangunan di wilayah-wilayah transmigrasi. Meskipun pada awalnya program ini dirancang sebagai subsidi yang ditargetkan untuk kelompok miskin dan menempatkan perusahaan untuk menyediakan jasa pembangunan perkebunan, di dalam konteks spasio-temporal yang lain program ini jelas-jelas dirancang untuk mempertemukan kebutuhan akan tenaga kerja bagi investor perkebunan, misalnya melalui skema inti-plasma (Li, 2011: 9). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari perspektif tenaga kerja transmigrasi merupakan sarana yang dirancang pemerintah untuk memenuhi suplai tenaga kerja bagi korporasi agribisnis.

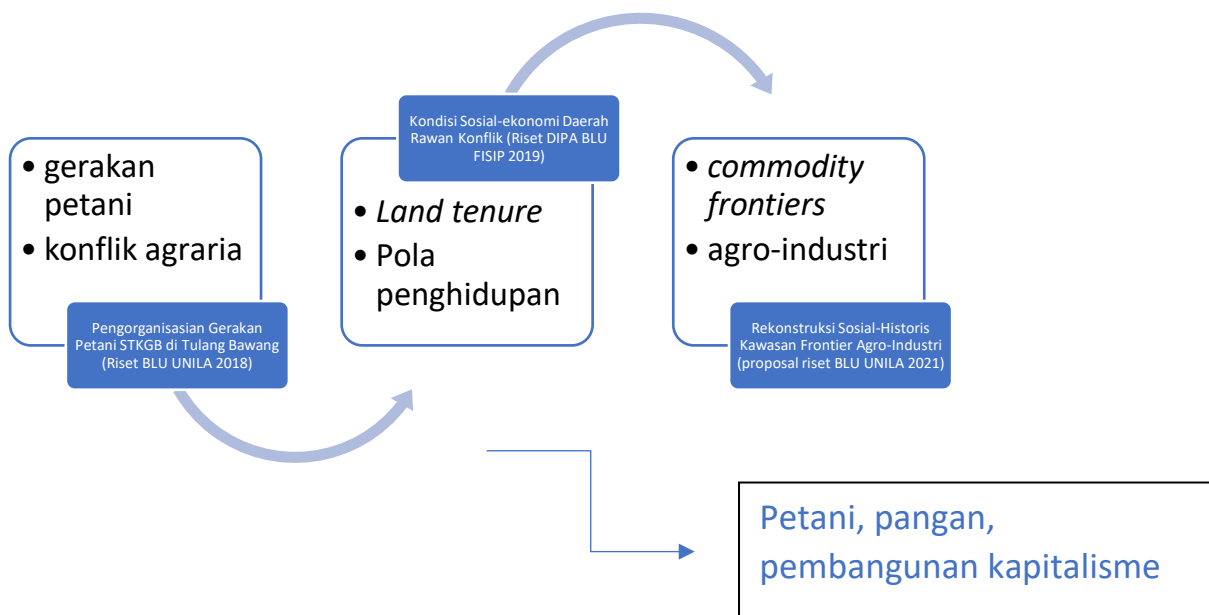
Berdasarkan studinya di wilayah transmigrasi di Sulawesi Tengah, Tania Li mengamati taktik yang digunakan korporasi perkebunan untuk memproduksi begitu banyak tenaga kerja serta peran penting dari program transmigrasi dalam mendukung rezim tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam kasus perkebunan kelapa sawit kendali terhadap tenaga kerja dilaksanakan melalui strategi pemagaran lahan yang menyingkirkan populasi lokal sementara itu mengimpor tenaga kerja dari tempat yang jauh serta menerapkan relasi kerja yang informal. Proses pemagaran (*enclosure*) dan alokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit memunculkan rezim tenaga kerja yang eksploitatif. Dalam konteks ini, kebijakan transmigrasi yang dikeluarkan pada 1997 telah menghasilkan “surplus” populasi (tenaga kerja) dan secara aktif memproduksi kondisi struktural yang mempertahankan pemiskinan dalam skala yang signifikan (Li, 2016). Kajian Li menunjukkan pentingnya memandang transmigrasi sebagai bagian dari pengaturan tenaga kerja untuk kepentingan kapital yang difasilitasi negara

sekaligus menunjukkan relevansinya untuk menempatkan kebijakan populasi tersebut dalam hubungan dengan rezim tenaga kerja di wilayah rintisan perkebunan.

Pengamatan Li relevan dengan kasus di Tulang Bawang. Kawasan Unit 1 sampai 8 di kecamatan Banjar Agung merupakan wilayah transmigrasi pertama di Tulang Bawang yang dibuka pada tahun 1977. Transmigran yang didatangkan ke sana bukan ditujukan untuk mengelolaa lahan persawahan untuk produksi padi namun telah diproyeksikan sebagai petani karet, salah satu komoditas global yang memiliki jejak sejarah panjang di pulau Sumatera. Dengan kata lain, transmigrasi yang dilakukan ditujukan untuk menempatkan petani dalam suatu rantai komoditas global sebagai produsen dari komoditas tertentu. Skema lain juga ditemui pada desa-desa di sekitar perkebunan tebu PT BNIL. Skema transmigrasi yang dilakukan di wilayah ini berupaya untuk mengkoneksikan petani dengan perusahaan perkebunan kelapa hibrida. Tumpang tindih peruntukan lahan transmigrasi dan perkebunan pada gilirannya membuka konflik agrarian yang disebabkan sengketa lahan antara petani dan perusahaan dan masih terkatung-katung hingga saat ini (Abdulgani & Ikram, 2018). Sama seperti pengamatan Li, petani di wilayah perkebunan BNIL pada akhirnya menjadi buruh murah di perkebunan maupun sektor lainnya.

2.3 Road map penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.



Pada 2018 dilakukan penelitian tentang gerakan petani dan konflik agraria yang bersifat analisis sosio-historis. Tahun 2018 dilakukan penelitian yang sifatnya sinkronik untuk mengetahui pola relasi tenurial dan pola penghidupan dari komunitas-komunitas petani yang mengalami konflik agraria. Tahun 2021 penelitian diarahkan untuk menelusuri sejarah kawasan melalui lensa komoditas dan proses komodifikasi. Rangkaian riset ini diharapkan mampu memberi informasi untuk menganalisis beberapa tema yang saling terkait: petani, pangan, pembangunan, dan proses kapitalisme.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Secara teoretik penelitian ini menggunakan paradigma ekonomi politik khususnya kajian agrarian kritis (Bernstein, 2010) untuk mengamati proses perubahan agraria di Tulang Bawang. Paradigma ini juga mengakomodir konsep *commodity frontiers* yang digunakan sebagai konsep operasional dalam merekonstruksi kawasan agro-industri di Tulang Bawang. Oleh karena itu, nalar penelitian ini akan bersifat historis dan struktural. Historis dalam arti penelitiannya condong untuk menganalisis proses-proses yang memungkinkan muncul sesuatu fenomena, karena itu analisisnya bercorak retrospektif (“penalaran ke belakang”). Struktural dalam arti bahwa dalam analisis historis tersebut analisis juga memerhatikan kesaling-hubungan antara elemen yang memungkinkan munculnya totalitas kenyataan. Titik berangkat analisa penelitian ini adalah produksi komoditas utama industri pertanian di Tulang Bawang yakni tebu, singkong, kelapa sawit, dan udang. Kami akan melihat bagaimana sejarah produksi komoditas tersebut dalam mekanisme industrial membentuk lansekap ekologi kawasan di Tulang Bawang.

3.2 Teknik Penggalan Data

Penelitian ini akan memadukan pekerjaan studi arsip dan dokumen serta penelitian lapangan etnografis untuk mengumpulkan data.

- a. Studi arsip dilakukan untuk mencari, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi dari arsip lembaga pemerintah, media massa, surat resmi untuk merekonstruksi suatu fenomena di masa lampau (Kuntowijoyo, 1994). Studi arsip akan dilakukan terhadap sumber informasi yakni perusahaan agro-industri, pemerintah (khususnya berkaitan dengan transmigrasi), dan media massa (Kompas).
- b. Penelitian lapangan etnografis dilakukan untuk menangkap gambaran lansekap penelitian dan dimensi sosial di dalamnya. Penggalan data dalam kerja lapangan memadukan pengamatan dan wawancara. Secara khusus wawancara juga akan diarahkan untuk menggali sejarah lisan (Thompson, 2012) sebagai salah satu sumber informasi dalam merekonstruksi sejarah kawasan dan triangulasi informasi berdasarkan arsip serta wawancara dengan pihak perusahaan. Penelitian lapangan khususnya akan dilakukan kepada informan: perusahaan agrobisnis, serikat petani, tokoh masyarakat setempat, dan pemerintah.

3.3 Alur Penelitian



3.4 Indikator Capaian

Metode	Sumber informasi	Data
Studi arsip dan dokumen	Lembaga pemerintah: Bappeda Kabupaten, Perpustakaan Daerah dan Provinsi, Dinas Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan	- Dokumen sejarah transmigrasi - RTRW - Data ketenagakerjaan di industri pertanian - Profil data industri pertanian di Tulang Bawang dan peta sebaran lokasi industri
	Perusahaan agro-industri: kelapa sawit, tebu, udang, singkong	- Profil industri: luasan lahan/ konsesi, kapasitas produksi, keuntungan, tenaga kerja, diversifikasi produk dan konsumen industri - Sejarah pembangunan industri
Penelitian lapangan	Lembaga pemerintah: Bappeda Kabupaten, Perpustakaan Daerah dan Provinsi, Dinas Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan	Sejarah pembangunan daerah, visi perencanaan daerah
	Perusahaan agro-industri: kelapa sawit, tebu, udang, singkong	Sejarah operasional perusahaan, mekanisme kerja dengan aktor-aktor lain (petani, tengkulak, konsumen, dsb.)

	Serikat petani, tokoh masyarakat	Sejarah lisan: perubahan lansekap, komoditas dan pertanian, pola-pola penghidupan
--	----------------------------------	---

BAB 4. TRANSFORMASI AGRARIA DI TULANG BAWANG

4.1. Kebijakan Pembangunan dan Transformasi Agraria

Menganalisis transformasi agraria di Tulang Bawang dimulai dari pengamatan kondisi demografi dan ekonomi saat ini terkait dengan warisan program transmigrasi (Elmhirst, 2012; Tirtosudarmo, 2013). Sama halnya dengan daerah lain di Lampung, dan umumnya di Indonesia, program transmigrasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah tujuan (Fearnside, 1997). Dari aspek lingkungan, transmigrasi telah menyebabkan perubahan lanskap ekologis. Kawasan hutan diubah menjadi lahan pertanian dengan model budidaya sebagian didatangkan dari daerah asal transmigran (Jawa, Bali, dan Pulau Madura) atau mengikuti instruksi pemerintah untuk membudidayakan komoditas baru seperti karet atau kelapa sawit. Sehingga, dari segi ekonomi, hal ini memunculkan perbedaan pola tanam dan penghidupan antara transmigran dan masyarakat asli Lampung, yang secara tradisional dikenal sebagai petani swidden. Program transmigrasi di Tulang Bawang dilakukan pada periode Repelita I (1969-1979) dan Repelita II (1979-1989) di bawah rezim Orde Baru (Levang & Sevin, 1989), dimana transmigran pertama tiba pada tahun 1977 dan menetap di Unit 1 yang terletak di Banjar saat ini. Kecamatan Margo. Ada skema petak lahan yang berbeda selama pelaksanaan program. Ini terdiri dari memasukkan petani kecil ke dalam produk komoditas global baru seperti kelapa sawit (skema Trans-PIR) dan karet. Oleh karena itu, program ini tidak hanya menyediakan sarana penghidupan bagi petani kecil. Selain itu, menggabungkan mereka dengan pasar yang lebih besar dan produksi komoditas.

Namun demikian, bukan berarti hanya petani transmigran yang berintegrasi dengan pasar internasional melalui produksi komoditas. Meskipun masyarakat Lampung secara tradisional melakukan perladangan berpindah untuk menghasilkan makanan pokok (beras), mereka juga berintegrasi dengan pasar yang lebih besar dengan memproduksi lada di kebun mereka. Integrasi dengan pasar internasional ini terjadi sejak zaman pra-kolonial. Perdagangan lada difasilitasi melalui sungai Tulang Bawang yang menjadi jalan utama pada masa pra-kolonial dan kolonial, serta menempatkan Menggala sebagai pelabuhan dan pasar utama perdagangannya sebelum lada dikapalkan ke selat Melaka atau Singapura melalui sungai (Ariwibowo, 2018). Posisi Menggala yang strategis sebagai pintu gerbang pantai timur Sumatera bagian selatan ini harus menyebabkan dua pusat politik, Kesultanan Palembang di utara dan Kesultanan Banten di Lampung selatan, terlibat dalam pertempuran untuk menjajah

sebelum Belanda kemudian turun tangan untuk menguasainya. dari Menggala. Namun, seiring dengan terjadinya transformasi struktural ekonomi dan politik di kepulauan Nusantara yang menjadi prasyarat munculnya negara Indonesia modern, perdagangan lada berangsur-angsur menurun.

Perbandingan produksi lada oleh masyarakat adat Lampung pada masa pra dan kolonial, dengan transmigran dan karet atau kelapa sawit pada rezim Orde Baru Indonesia, mengungkapkan bahwa pengamatan terhadap transformasi agraria di Tulang Bawang, dan Lampung umumnya perlu dilakukan. mempertimbangkan hubungan antara aktor dan komoditas dalam ekonomi politik yang berubah terkait dengan perkembangan kapitalis. Dalam hal ini, identitas etnis, variasi budaya, dan proses geopolitik seperti migrasi dianggap sebagai variabel yang saling terkait dengan mode ekonomi. Transmigran dari Pulau Jawa dan Bali menciptakan kontur demografi baru di Lampung, dan hal itu perlu dilihat dari spektrum ekonomi politik yang lebih luas. Khususnya dalam transformasi ekonomi di mana produksi komoditas baru, bagian dari kerangka kerja yang lebih besar dari pembagian kerja internasional, prasyarat perbatasan baru (tanah) untuk tempat produksi baru yang terkait dengan pola budidaya baru (seperti perkebunan) dan pasokan bahan baku. tenaga kerja sehingga akumulasi modal dapat bekerja. Dari perspektif ini, kita dapat memahami mengapa para transmigran memainkan peran penting dalam pembangunan kapitalis agraris di Lampung, yang didasarkan pada kebutuhan modal untuk menjamin pasokan tenaga kerja. Hal ini pada gilirannya juga terkait dengan panorama perlawanan di Lampung yang sebagian besar melibatkan para transmigran itu sendiri. Oleh karena itu, perlawanan petani dipahami sebagai reaksi yang muncul dari proses penggabungan yang melibatkan mereka ke dalam akumulasi kapital yang terutama dikondisikan oleh proses empiris penggabungannya.

Kedatangan transmigran Jawa, Sunda, dan Bali pada gilirannya membentuk lanskap pedesaan multietnis baru di wilayah Banjar Margo. Unit pemukiman dusun transmigran awalnya adalah Dewa Agung, Banjar Dewa, Bandar Rejo, Pagar Agung I, Pagar Agung II, Karya Agung, dan Tanjung Mulya, yang kemudian ditetapkan sebagai desa. Desa-desa baru tersebut berada di wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari dua desa lama, yaitu Banjar Agung dan Indraloka II. Dari segi ekonomi, terbentuk lanskap baru di mana masyarakat Lampung melakukan perladangan berpindah sementara para transmigran umumnya menanam padi di lahan kering dan tanaman sekunder. Dengan demikian, pembahasan aspek identitas perlu ditekankan pada latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya transmigran terkait dengan sejarah komunitas tani di suatu tempat tertentu. Program transmigrasi telah berkontribusi pada pembentukan daerah pedesaan baru dan pedesaan baru.

4.2. Komoditisasi dan Perampasan Lahan

Proses krusial dalam reforma agraria terletak pada restrukturisasi kepemilikan dan penguasaan tanah. Tugas-tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UU Agraria 1960. Proses tersebut menjadi krusial dewasa ini karena tumpang tindih penguasaan tanah semakin akut, dan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya konflik agraria yang terkait dengan sengketa tanah. Konflik agraria di Tulang Bawang, khususnya antara petani Banjar Margo dan PT BNIL, berakar pada sengketa tanah yang tidak kunjung selesai dan berkepanjangan meskipun pemerintah memprioritaskan program Reforma Agraria. Bagian ini akan merekonstruksi akar konflik agraria di Tulang Bawang yang terletak pada konteks perubahan kebijakan ekonomi, perluasan perkebunan, dan tumpang tindih kebijakan pertanahan.

Akumulasi modal melalui produksi komoditas baru di Lampung ditandai dengan agribisnis skala besar perusahaan swasta pada 1980-an. Pembentukan mereka dikondisikan oleh perubahan kebijakan pembangunan, terutama dalam menanggapi jatuhnya harga minyak dunia di awal tahun 1970-an. Diluncurkannya kebijakan liberalisasi ekonomi pada tahun 1983 telah memberikan pertumbuhan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor dan penyebaran perkebunan skala besar, seperti kelapa sawit, di sektor pertanian. Pengembangan perkebunan tersebut diarahkan untuk dilaksanakan di luar pulau Indonesia yang luas hutannya relatif luas. Namun demikian, pembangunan perkebunan memperoleh mekanisme lain untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja karena jumlah penduduk di pulau terluar relatif lebih sedikit dibandingkan Jawa dan Bali. Pada titik ini, kawasan hutan di pulau terluar yang disediakan untuk program transmigrasi menjadi lokasi yang strategis untuk pengembangan agribisnis skala besar karena dapat menyediakan cadangan tenaga kerja. Hal ini juga mengkondisikan relevansi skema Trans-PIR, di mana pemukiman kembali penduduk diintegrasikan dengan liberalisasi sektor pertanian untuk mendorong produksi komoditas berorientasi ekspor.

Di Tulang Bawang, akumulasi modal tidak hanya dilakukan melalui perusahaan agribisnis swasta. Ini juga terdiri dari penggabungan petani kecil dengan produksi komoditas global. Investasi agribisnis dirintis pada 1980-an terakhir, seperti perkebunan tebu (1990), kelapa sawit (1989), kelapa hibrida (1989), dan tambak udang (1989). Sementara itu, penggabungan petani kecil ke dalam produksi komoditas beroperasi dalam produksi karet dan kelapa sawit. Petani kelapa sawit didirikan dalam program Trans-PIR pada tahun 1994 dan berakhir pada tahun 2000. Saat ini, sebagian besar tandan buah segar kelapa sawit di Tulang Bawang dipasok dari petak petani. Di sisi lain, karet diperkenalkan melalui peruntukan lahan

transmigrasi pemerintah (Dinas Transmigrasi), dimana 2 ha dari total 5 ha disisihkan untuk tanaman karet. Kedua komoditas ini memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, dimana 54% penduduk Tulang Bawang bergantung pada produksi kelapa sawit dan karet (BPS, 2020).

Dalam penelitian ini, sengketa tanah yang menjadi objek konflik agraria dimulai ketika pemerintah menetapkan status “tanah pencadangan” di lokasi pemukiman transmigran yang sudah berpenduduk di Banjarmasin. Penetapan lokasi “cadangan” yang dialokasikan untuk kegiatan produksi agribisnis ditujukan untuk memfasilitasi perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida akibat kebijakan liberalisasi ekonomi di sektor perkebunan. Latar belakang peningkatan produktivitas pertanian terjadi pada tahun 1970-an ketika produksi kelapa di Indonesia menurun (TEMPO, 1979). Pada tahun 1976 pemerintah membeli benih kelapa hibrida yang diproduksi di Perancis untuk diujicobakan di Indonesia guna meningkatkan produksi kelapa, salah satunya untuk ditanam di Lampung (TEMPO, 1986). Konteks ini memungkinkan perusahaan agribisnis seperti PT BNIL untuk berinvestasi dalam membangun perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida. Secara rinci, proses perampasan transmigran di Banjarmasin telah dijelaskan dalam artikel lain (Ikram, 2020). Di sini, kami hanya menegaskan kembali bahwa kegagalan pemerintah saat itu terletak pada alokasi penggunaan lahan mengakibatkan munculnya benih-benih konflik. Selain itu, penting untuk digarisbawahi bahwa skema inti-plasma (kontrak pertanian) yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai solusi sengketa tanah adalah cara memasukkan petani kecil ke dalam produksi komoditas. Namun dalam kasus Banjarmasin, petani yang telah setuju untuk menyerahkan lahan seluas 1 ha ini mengalami kecurangan dalam proses kesepakatan lahan sehingga lahan plasma mereka diserahkan kepada perusahaan. Kasus tersebut menjadi alasan utama petani Banjarmasin menuntut hak atas tanah.

BAB 5. DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI TINGKAT LOKAL

5.1 Perlawanan terhadap Pembangunan

Perebutan lahan petani Banjar Margo telah berlangsung selama tiga dekade (1986 – 2021). Selama ini aksi politik petani bertransformasi dari bentuk perlawanan spontan dan tidak terorganisir menjadi aksi politik yang lebih sistematis dan terorganisir, terutama ketika Serikat Tani Korban Gusuran PT BNIL (STKGB) atau PT BNIL Tergusur Petani Korban Gusuran pada tahun 2016. Aksi politik kaum tani dipahami sebagai bentuk reaksi politik dari bawah. Kami berpendapat bahwa memahami artikulasi resistensi yang muncul dan kegigihannya petani Banjar Margo perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan identitas, hubungan antara pemimpin tani dan aktivis di luar komunitas tani, dan pentingnya peluang struktur politik (Tarrow, 1994).

Berdasarkan keragaman aktor politik, perlawanan petani dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah perlawanan tanpa aliansi dengan kekuatan politik di luar masyarakat. Fase kedua adalah perlawanan yang melibatkan aliansi politik dengan kelompok-kelompok di luar komunitas tani (khususnya para aktivis, yang selanjutnya disebut "aktor eksternal"). Dalam tiga dekade terakhir, aktor-aktor eksternal tersebut merupakan elemen politik yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu. Yang membedakan fase pertama dan kedua terletak pada adanya advokasi kasus. Pada tahap pertama, perlawanan muncul sebagai reaksi langsung terhadap proses penggusuran, berupa menghindari pertemuan untuk proses pemukiman kembali (difasilitasi oleh pemerintah atau perusahaan) atau konfrontasi terhadap upaya relokasi. Konfrontasi terjadi sebagai respons individu dan bukan tindakan terorganisir. Petani perorangan yang menolak proses penggusuran mengakibatkan kekerasan fisik oleh aparat keamanan. Tahap pertama ini tidak melibatkan aliansi dengan kelompok masyarakat lain yang membantu petani untuk memperjuangkan kepentingannya.

Fase kedua dimana perlawanan petani melibatkan aktor eksternal dari komunitasnya setelah penggusuran paksa dilakukan. Pada fase kedua ini, bentuk-bentuk aksi dilakukan secara kolektif oleh banyak aktor, baik komunitas tani maupun aktivis eksternal. Bentuk tindakan juga ditentukan oleh struktur peluang politik yang muncul. Struktur tersebut mengkondisikan tindakan petani dalam penguatan kapasitas masyarakat, advokasi pemerintah, atau politik jalanan (protes terbuka, boikot, pendudukan tanah). Tabel 1 menunjukkan kronologi aksi politik petani untuk menunjukkan dengan siapa mereka beraliansi, bentuk aksi, dan struktur peluang politik yang mengkondisikan aksi tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, identitas petani Banjar Margo adalah multi etnis. Bahkan di antara para transmigran Jawa, daerah asal mereka berbeda, dan kita tidak bisa menggeneralisasikan ciri khas masing-masing komunitas pedesaan di Jawa. Namun, pengalaman pengusuran dan marginalisasi secara ekonomi dan spasial, pada gilirannya, membentuk identitas baru yang dituangkan dalam nama serikat tani yang mereka dirikan, yaitu sebagai “korban pengusuran oleh PT BNIL”. Identitas sebagai korban pengusuran menegaskan posisi mereka yang berhadap-hadapan dengan perusahaan dan melanggengkan kepentingan mereka dalam upaya merebut kembali hak atas tanah. Apalagi melalui identitas ini, pengalaman menjadi korban dalam proses perampasan tanah dikristalisasikan sebagai identitas baru yang menjadi ikatan di antara mereka yang melampaui perbedaan budaya seperti bahasa dan tempat asal.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah lintasan hubungan petani dengan aktivis (kelompok dan individu) di luar Banjar Margo, yang juga terkait dengan perbedaan strategi perjuangan hak atas tanah. Hal ini tampak kontras dengan aksi-aksi politik yang dilakukan oleh masyarakat tani itu sendiri. Seperti terlihat, bentuk-bentuk aksi politik yang digagas dan dilakukan petani cenderung tidak menekankan pada upaya advokasi. Meskipun pada masa awal Reformasi pernah terjadi demonstrasi oleh para petani kepada pemerintah yang dipimpin oleh kepala desa, namun tidak terlihat jejak upaya advokasi hukum, kecuali upaya yang dilakukan oleh Tim Reformasi Damai melalui lobi-lobi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh kaum tani sendiri cenderung politik yang kontroversial, baik melalui demonstrasi di kantor-kantor pemerintahan hingga bentuk-bentuk frontal seperti sabotase dan perusakan properti perusahaan.

Dari sisi aktor eksternal, perbedaan upaya memperjuangkan hak atas tanah juga dipengaruhi oleh karakter politik institusi dan individu (aktivis) yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perlawanannya, kami telah mengidentifikasi beberapa lembaga yang terkait dengan petani Banjar Margo, yaitu LBH Jakarta, LBH Bandar Lampung, dan DPD Petani. Peningkatan kapasitas pemahaman hukum dan kapasitas organisasi menjadi titik sentral mereka, meskipun dalam hal ini tidak ada jejak organisasi petani hasil kerjasama dengan LBH. Hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum (berpusat di Jakarta dan Bandar Lampung) secara terprogram menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural dalam praktik advokasinya, dengan menitikberatkan pada proses konsultasi hukum dan pengorganisasian masyarakat. Proses advokasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan oleh DPD Tani, sebuah LSM lokal yang berbasis di Bandar Lampung, meskipun jejak dan hasilnya tidak dapat dilacak.

Bentuk hubungan yang berbeda muncul ketika SG, seorang community organizer, secara sukarela membantu para petani karet di Desa Bujuk Agung. SG adalah pendeta dari Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS). Ia memiliki rekam jejak aktivisme yang panjang sejak ia belajar di Yogyakarta dan bergabung dengan kegiatan pengorganisasian komunitas Kali Code yang dipimpin oleh Y.B. Mangunwijaya, seorang pendeta Katolik, penulis terkemuka Indonesia, dan aktivis sosial. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, SG bertemu dengan HM, seorang petani karet dari desa Bujuk Agung yang dikenalnya sejak menjadi relawan kemanusiaan dalam kasus penggusuran di daerah konflik Register 45 Mesuji. HM memiliki pengalaman membentuk Serikat Tani di Register 45 saat menggarap lahan di sana. Kegiatan pengorganisasian tersebut kemudian diakomodir dalam sebuah organisasi bernama AGRIBS yang fokus pada pemberdayaan kapasitas ekonomi petani karet.

5.2 Reaksi Politik Petani Transmigran

Konteks yang perlu diperhatikan dalam melihat transformasi perlawanan petani dari bentuk spontan dan sporadis ke bentuk terorganisir adalah struktur peluang politik yang terbuka ketika terjadi sengketa lahan perkebunan PT BNIL. Momentum itu dimulai dengan mengganti komoditas perkebunan PT BNIL dari kelapa sawit menjadi tebu yang disetujui pemerintah kabupaten pada 2013 lalu. Namun pada tahun 2015 Bupati mengeluarkan SK pencabutan izin usaha perkebunan PT BNIL karena PT BNIL belum menyampaikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam SK 2013. Namun, PT BNIL kemudian mengajukan gugatan terhadap SK Bupati tersebut, dan dikabulkan Mahkamah Agung pada tahun 2015 (*Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 13-G-2015-PTUN-BL*, n.d.).

Peristiwa tersebut menimbulkan polemik ketika izin usaha perkebunan PT BNIL dibekukan sementara, dan muncul sebagai momentum bagi para petani untuk mengajukan tuntutan. Strategi politik jalanan mengemuka, baik yang ditujukan kepada pemerintah maupun perusahaan. Sangat menarik untuk dicatat di sini ekspresi politik dari generasi yang berbeda. Pada aksi unjuk rasa massal 2015, Pak KM, salah satu transmigran Banjar Margo generasi pertama yang mengalami proses penggusuran secara langsung, muncul sebagai pemimpin gerakan. Di sisi lain, tanpa adanya korelasi organisasional, ekspresi politik generasi kedua petani Banjar Margo yang notabene tidak mengalami proses penggusuran lahan diwujudkan dalam pendudukan lahan perkebunan dengan membuka lahan dan menanam tanaman mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengalaman marginalisasi bersifat lintas generasi meskipun

ekspresi politik antar generasi berbeda dan terbukanya struktur peluang politik memungkinkan munculnya berbagai ekspresi politik tersebut.

Konteks penting lainnya untuk memahami transformasi perlawanan petani adalah jaringan sosial antar aktivis yang terdiri dari relasi antara aktivis perkotaan dan pedesaan, kelompok marjinal, dan aktivis/organisasi hak asasi manusia. Pertemuan-pertemuan yang mempertemukan para aktivis individu dari kalangan LSM perkotaan dan komunitas marjinal seringkali difasilitasi oleh organisasi seperti LBH Bandarlampung yang kegiatan utamanya adalah advokasi. Melalui LBH, Pak KM dan petani Banjar Margo lainnya (aktivis internal) bersama SG (aktivis eksternal) dan HM bertemu. Momen tersebut menjadi titik awal untuk mentransformasikan perlawanan petani ke dalam bentuk yang terorganisir, ditandai dengan berdirinya STKGB.

Transformasi perjuangan hak atas tanah petani Banjar Margo terlihat dari upaya mobilisasi sumberdaya yang telah dilakukan STKGB. Melalui STKGB, petani merancang struktur organisasi dan program serta menyusun agenda kerja, baik litigasi maupun nonlitigasi. Mereka melakukan sosialisasi serikat tani di kalangan masyarakat korban pengusuran BNIL untuk menjangkau konstituen dan membangun basis sosial. Ada juga agenda pendataan anggota serikat dan keluarga korban pengusuran serta ahli warisnya sebagai pihak yang berhak atas tanah yang diklaim. Membentuk organisasi perempuan “Srikandi”, dan memprakarsai praktik berkebun sayur bersama. Mereka mengumpulkan berkas dan dokumentasi serta memaparkan kasus-kasus sengketa tanah sebagai bahan untuk proses advokasi hukum melalui jalur hukum. Menciptakan pembiayaan sendiri melalui iuran keanggotaan dan menetapkan standar keuangan dan operasional untuk mendukung kegiatan serikat. Mereka juga menjalin jejaring dengan LSM lain dan mengirimkan kader untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh jaringan LSM yang fokus pada agenda reforma agraria. Hasil dari basis konstituensi petani yang terorganisir tercermin dari pendudukan lahan perkebunan PT BNIL yang terjadi pada bulan Oktober 2016 dimana sekitar 2000 petani Banjar Margo menduduki lahan tersebut selama hampir satu bulan, meskipun kejadian ini berujung pada konflik dengan paramiliter perusahaan dan kriminalisasi terhadap Aktivis STKGB (Kresna, 2017).

Dalam teori gerakan sosial, mobilisasi sumber daya merupakan salah satu elemen penting yang mengkondisikan kekuatan gerakan sosial tertentu dalam mencapai tujuannya (Hartoyo et al., 2010; McCharty & Zald, 1977). Pendirian STKGB menjadi sarana bagi petani Banjar Margo untuk mensistematisasikan kepentingan, memperkuat basis sosial, dan memobilisasi sumber daya. Agenda utama STKGB adalah merebut kembali lahan plasma (1

ha) yang diperoleh PT BNIL dan melibatkan diri dalam mendukung reforma agraria dalam kerangka gerakan sosial (tani) yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran eksternal aktivis seperti SG dengan luasnya jaringan sosial sangat penting untuk menghubungkan Serikat dengan berbagai organisasi dan individu di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini memungkinkan upaya litigasi dalam kasus sengketa tanah dapat diadvokasi melalui konsultasi dengan lembaga negara seperti Komnas HAM, yang juga melibatkan peran LSM nasional seperti KPA. Melalui upaya ini, kasus sengketa tanah PT BNIL diprioritaskan dalam program Reforma Agraria pemerintah, khususnya mengenai penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut. Dengan kata lain, transformasi ke dalam bentuk perjuangan yang terorganisasi melalui organisasi serikat tani dapat dilihat sebagai reforma agraria dengan daya ungkit (Wiradi, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, pemahaman tentang konflik agraria di Tulang Bawang perlu ditempatkan dalam analisis transformasi agraria. Ini menggarisbawahi pentingnya melihat perubahan dalam kebijakan ekonomi, proses akumulasi modal, kebijakan tanah dan proses kesepakatan tanah di tingkat mikro. Kedua, memahami kegigihan perlawanan petani dalam konteks konflik agraria yang berkepanjangan perlu menyikapi lintasan hubungan antara komunitas petani (aktivis internal) dengan aktivis eksternal yang memiliki jaringan sosial lebih luas di tingkat provinsi dan nasional.

BAB VI KESIMPULAN

Transformasi agraria di Tulang Bawang menunjukkan pentingnya mengamati hubungan antara masyarakat dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda yang dikondisikan oleh proses geopolitik tertentu. Kedua variabel ini saling terkait dengan perubahan mode ekonomi yang dikondisikan oleh kebijakan ekonomi dan proses akumulasi modal. Mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, pada tahap awal pembukaan lokasi transmigrasi, terjadi kesepakatan tanah antara masyarakat adat Lampung dengan para transmigran. Pada titik ini, terjadi kesepakatan tanah bentuk kedua yang melibatkan transmigran (petani kecil) dan perusahaan agribisnis. Keberadaan transmigran memainkan peran penting dalam pembangunan kapitalis karena menyediakan sumber tenaga kerja dalam proses akumulasi modal. Transmigran dimasukkan ke dalam produksi komoditas melalui skema pertanian kontrak seperti plasma inti dalam gaya agribisnis industri yang dikendalikan perusahaan. Dalam proses ini sering terjadi kecurangan dan pelanggaran hak-hak petani, yang menjelaskan mengapa banyak konflik agraria di Lampung yang melibatkan komunitas transmigran. Lebih lanjut, kondisi tersebut merupakan kontur baru yang membentuk pedesaan baru di Lampung. Daerah pedesaan menjadi ruang yang diperebutkan antara petani kecil, kelompok etnis yang berbeda (Elmhirst, 2001), dan perusahaan agribisnis skala besar untuk mengakses sumber daya.

Dalam konteks di atas, munculnya perlawanan petani terhadap kekuatan agribisnis perkebunan perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti identitas dan relasi yang menghubungkan berbagai aktor yang terlibat dalam konflik politik. Struktur peluang politik dan pola relasi antara aktivis internal dan eksternal mengkondisikan bagaimana ekspresi politik petani mewujud dalam memperjuangkan kepentingannya. Tentang identitas, kajian ini menunjukkan titik kritis bahwa artikulasi identitas baru menandai perubahan dalam bentuk perebutan tanah. Lahirnya STKGB menandai munculnya identitas baru yang melampaui budaya, bahasa, dan identitas mereka sebelumnya sebagai transmigran. Identitas baru yang digunakan dalam nama Serikat Tani adalah tindakan untuk mengabadikan perampasan yang mereka alami. Artikulasi dan penggunaan identitas baru sangat penting jika kita menggunakan sudut pandang generasi untuk memahami kegigihan gerakan sosial.

Selanjutnya, bertahannya perlawanan petani dipengaruhi oleh hubungan antara aktivis internal dan aktivis eksternal. Pengamatan terhadap hubungan ini sangat penting untuk

memahami perbedaan upaya memperjuangkan hak atas tanah yang dipengaruhi oleh karakter dan strategi aktivisme lembaga atau individu eksternal tersebut. Keberadaan aktivis eksternal memainkan peran penting dalam dua arah. Di satu sisi, yaitu “orientasi ke luar”, mereka mengadvokasi kasus melalui jejaring sosial mereka. Mereka berperan dalam menghubungkan komunitas dengan jejaring sosial yang lebih luas. Di sisi lain, atau “orientasi ke dalam”, mereka berkontribusi untuk membentuk basis sosial dalam komunitas petani melalui kegiatan pengorganisasian. Kami mengamati bahwa hubungan yang terbentuk antara aktivis internal dan eksternal adalah bagian dari reformasi agraria melalui proses “dari bawah” (Wiradi, 2009).

Beberapa pertanyaan diajukan untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, mengenai hubungan antara resistensi dan aspek generasi, penting untuk mengetahui bagaimana pengalaman marginalisasi ini diturunkan kepada generasi muda sejak generasi ketiga dari generasi transmigran pertama telah hadir. Bagaimana ingatan kolektif perampasan tanah ini ditransmisikan, dan bagaimana generasi muda saat ini memandang pengalaman ini dan perjuangan hak atas tanah yang dilakukan oleh generasi pertama dan kedua?. Kedua, mengenai reformasi agraria melalui proses leverage, penting untuk melihat sejauh mana gerakan sosial akar rumput dapat menegakkan reformasi dan kebijakan agraria yang sejati. Relevansi tersebut terjadi ketika agenda Reforma Agraria cenderung direduksi menjadi sarana teknis daripada menegakkan pemerataan kepemilikan dan penguasaan tanah.

REFERENSI

- Abdulgani, F. & Ikram. (2018). *Transformation of Resistance: a three-decade of BNIL's evicted peasants community struggling for land in Lampung*. Presentasi poster pada konferensi internasional Rural Social and Economic Transformation IPB, Bogor, Desember 2018.
- Ariwibowo, G. A. (2018). Sungai Tulang Bawang dalam Perdagangan Lada di Lampung pada Periode 1684 hingga 1914. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 253.
<https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.442>
- BPS. (2020). *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Elmhirst, R. (2001). Resource Struggles and the Politics of Place in North Lampung, Indonesia. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 22(3), 284–306.
<https://doi.org/10.1111/1467-9493.00111>
- Elmhirst, R. (2012). Displacement, Resettlement, and Multi-local Livelihoods: Positioning Migrant Legitimacy in Lampung, Indonesia. *Critical Asian Studies*, 44(1), 131–152.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2012.644891>
- Fearnside, P. M. (1997). Transmigration in Indonesia: Lessons from Its Environmental and Social Impacts. *Environmental Management*, 21(4), 553–570.
<https://doi.org/10.1007/s002679900049>
- Habibi, M. (2016). *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Hartoyo, Soetarto, E., Dharmawan, A. H., & Lawang, R. M. (2010). Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumberdaya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran Sebagai Basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung. *AGRISEP*, 11(2), 83–100.
- Ikram. (2020). *PENGELOLAAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA PT. BNIL; Studi Kasus di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung* [Tesis, Universitas Kristen Duta Wacana].
https://katalog.ukdw.ac.id/2549/1/54150001_bab1_bab6_daftar pustaka.pdf
- Kresna, M. (2017, February 27). *Ketika Tuntutan Petani Tulang Bawang Dijerat Pidana*.
<https://tirto.id/ketika-tuntutan-petani-tulang-bawang-dijerat-pidana-cjLw>
- Levang, P., & Sevin, O. (1989). 80 years of transmigration in Indonesia 1905—1985. *Departemen Transmigrasi Dan ORSTOM*, 27.
- Levang, P. (2003). *Ayo ke Tanah Sabrang: transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Li, Tania M. (2011). *Centering labor in the land grab debate*. *Journal of Peasant Studies*, 38 (2): 281-298.
- Li, Tania M. (2016). *Situating Transmigration in Indonesia's Oil Palm Labour Regime*. Dalam Cramb, R. & McCharty, J.F (eds.). *The Oil Palm Complex; Smallholders, Agrobusiness, and the State in Indonesia and Malaysia*, hlm. 354-377. Singapore: NUS Press.

- McCharty, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *The American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- McMichael, P. (2020). *Rezim Pangan dan Masalah Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Moore, J. W. (2000). Sugar and the Expansion of the Early Modern World-Economy: Commodity Frontiers, Ecological Transformation, and Industrialization. *Review (Fernand Braudel Center)*, 23(3), 409–433.
- Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 13-G-2015-PTUN-BL*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/81c84e77058ea1839151c08c9d777a24.html>
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- TEMPO. (1979, October 29). *Dari Lampung dengan Harapan*.
<https://www.datatempo.co/MajalahTeks/detail/ARM2018061280319/dari-lampung-dengan-harapan>
- TEMPO. (1986, March 8). *Mengawinkan si Jangkung*.
<https://www.datatempo.co/MajalahTeks/detail/ARM2018061235621/mengawinkan-si-jangkung>
- Thompson, P. (2012). *Suara dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Ombak.
- Tirtosudarmo, R. (2001). *Demography and Security: Transmigration Policy in Indonesia*. Dalam Weiner, M, & Russel, S.S (eds.). *Demography and National Security*, hlm. 199-226. Berghahn Books.
- Tirtosudarmo, R. (2013). *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*. LIPI Press. <http://ebook3d.pddi.lipi.go.id/konten/28/files/assets/basic-html/index.html#5>
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press.